

Filsafat Pancasila Soekarno sebagai Paradigma Pembangunan Manusia Seutuhnya

Ahmad Rifai
Universitas Peradaban
ahmad_rifaizen@peradaban.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali dan menganalisis filsafat Pancasila oleh Soekarno sebagai paradigma pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif melalui kajian kepustakaan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dengan menggunakan alat analisis metodis berupa kesinambungan historis, interpretasi dan heuristik atau penemuan baru. Adapun sumber primer yang digunakan adalah pemikiran-pemikiran filsafat Pancasila oleh Soekarno yang digunakan untuk membedah konsep pembangunan manusia seutuhnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan utama konsep pembangunan manusia Indonesia adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pengaplikasiannya diperlukan langkah konkret yang memiliki kesesuaian dengan falsafah negara, yaitu Pancasila. *Kedua*, Pembangunan manusia Indonesia menganut konsep pembangunan manusia seutuhnya yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun spiritual untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dalam seluruh aspek kehidupannya. *Ketiga*, konsep pembangunan manusia Indonesia dalam perspektif filsafat Pancasila oleh Soekarno dimaknai sebagai pembangunan yang tidak sekedar menekankan pada aspek kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong belaka, akan tetapi juga pembangunan pada aspek religiusitas.

Kata Kunci: *Filsafat Pancasila, Pembangunan Manusia, Soekarno.*

ABSTRACT

This research is intended to explore and analyze the Pancasila philosophy by Soekarno as a paradigm for the development of the whole Indonesian human being. This research is a research using qualitative methods through literature review. While the approach used in this research is a philosophical approach using methodical analysis tools in the form of historical continuity, interpretation and heuristics or new discoveries. The primary sources used are the philosophical thoughts of Pancasila by Soekarno which are used to dissect the concept of whole human development. This study concludes that the main foundation of the concept of Indonesian human development is the development of quality human resources, and the ability of science and technology, which requires concrete steps to be applied in accordance with the state philosophy, namely Pancasila. Second, Indonesia's human development adheres to the concept of complete human development which focuses on improving the quality of life of the population, physically, mentally and spiritually for the welfare of the Indonesian people in all aspects of their lives. Third, the concept of Indonesian human development in the perspective of the Pancasila philosophy by Soekarno was interpreted as development that not only emphasized the aspects of togetherness, kinship, and mutual cooperation, but also development on the aspect of religiosity.

Keywords: Pancasila Philosophy, Human Development, Soekarno.

PENDAHULUAN

Ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesungguhnya adalah muara dari proses-proses pembangunan dalam segala bidang. Konsepsi pembangunan terbaru adalah meletakkan manusia sebagai pusat perhatian. Konsep ini memperhatikan bahwa manusia perlu menyadari potensinya untuk meningkatkan pilihan-pilihan untuk

membawa kehidupannya lebih bernilai (UNDP, 2009). Untuk itu setiap negara perlu menyusun kebijakan yang menjamin kesejahteraan yang lebih baik dengan cara memperbaiki lingkungan, serta menjauhkan manusia dari konflik dan kerusakan lingkungan.

Hakikat dasar ontologi Pancasila adalah manusia, karena manusia merupakan subjek hukum

pokok sila-sila yang ada dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan lima sila yang mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak dengan sifat kodrat monodualis yaitu sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sekaligus juga sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensi dari dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah bahwa segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan kodrat manusia yang monodualis (Dewantara, 2017:11).

Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membangkitkan semangat

juang bangsa. Semangat juang itu bukan saja untuk menyelesaikan permasalahan keterpurukan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Kualitas itu akan lahir dari manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan memiliki etos kerja yang tinggi (Poespowardojo dan Hardjatno, 2010: 30). SDM berkualitas inilah yang akan menyusun konsep-konsep kebijakan pembangunan dan menjalankan penyelenggaraan negara yang lebih berorientasi kepada kesejahteraan dalam rangka peningkatan harkat bangsa sebagai manusia (Poespowardojo, 2010:35).

PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai manusia dalam kerangka filsafat Pancasila merupakan hal yang

penting dan sentral. Fenomenologi pada dasarnya melihat dan memandang segala bentuk fenomena yang menghadirkan fenomena tersebut dalam dunia, terlebih dalam dunia kesadaran. Fenomena berasal dari bahasa Yunani yaitu “*phainomenon*” yang artinya “apa yang terlihat, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai, gejala alam, serta kejadian-kejadian yang dapat dirasakan dan dilihat dengan panca indera. Hal ini memberikan arti bahwa fenomena adalah sesuatu yang dapat dilihat, diamati, dan dimaknai sebagai bagian dari kehidupan manusia (Rorong, 2020: 3). Dalam kerangka ilmu fenomenologi dapat dijelaskan bahwa kelima sila dalam Pancasila secara etis mengikat setiap manusia Indonesia untuk mematuhiya. Hal

tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam melakukan pemikiran reflektif mengenai rumusan Pancasila secara filosofis yang dikembangkan oleh Soekarno, terutama dalam konteks pembangunan manusia Indonesia.

Manusia yang Berpersatuan

Dalam menjelaskan konsep persatuan, Soekarno mengutip pendapat Ki Bagoes Hadikoesoemo, seorang pemikir Islam di Indonesia. Menurut Ki Bagoes, kebangsaan lahir dari ‘persatuan antara orang dan tempat’. Oleh karena itu Soekarno mengatakan:

“Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo,... mengatakan tentang “Persatuan antara orang dan tempat”. Persatuan antara orang dan tempat tuantuan sekalian, persatuan antara manusia dan

tempatnya! Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya... bumi yang didiami manusia itu.

Apakah tempat itu? tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah SWT. membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana “kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan... Kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatra sampai ke Irian (Rahardjo, 2001: 2001).

Soekarno beranggapan bahwa kebangsaan itu lahir karena tiga hal, yaitu kehendak untuk bersatu, persamaan karakter karena persamaan nasib, dan kaitan antara tempat (Tanah Air) dan penduduk yang mendiaminya. Ketiga hal tersebut sudah ada dan sudah bermanifestasi di zaman itu.

Semua rakyat saat itu sudah memiliki kehendak untuk menyatukan diri mereka dalam membangun “Bangsa Indonesia”; semua rakyat saat itu memiliki persamaan nasib yaitu nasib jadi rakyat yang terjajah; semua rakyat saat itu memiliki persamaan karakter yaitu karakter terjajah; dan semua rakyat saat itu sudah mendiami bumi Indonesia dari ujung Sumatera hingga ujung Papua (Irian), maka menurut Soekarno, sudah semestinyalah rakyat Indonesia mengklaim bahwa sudah memiliki kebangsaan, yaitu kebangsaan Indonesia.

Selain itu, Soekarno pun menegaskan bahwa jika prinsip “Kebangsaan” ini dimasukkan

ke dalam Pancasila dan dijalankan secara penuh kesadaran oleh semua rakyat Indonesia, maka negara Indonesia yang akan dibangun oleh Bangsa Indonesia akan kuat dan tidak gampang hancur.

Soekarno mengatakan:

“... Negara jikalau didasarkan antara lain atas rasa kebangsaan, negara demikian itulah kuat. Maka oleh karena itu kita dengan sengaja memasukkan sila Kebangsaan di dalam Pancasila kita... untuk negara yang kuat kita mesti mendasarkan negara itu atas kebangsaan” (Aning, 2016:178-179).

Soekarno benar-benar menginginkan sebuah negara yang kuat, bersatu dan berkemajuan berdasarkan semangat kebangsaan.

1. Manusia yang Berperikemanusiaan

Pidato Soekarno saat sidang perumusan Pancasila (1

Juni 1945), Soekarno tidak menggunakan kata “kemanusiaan yang adil dan beradab”, tetapi menggunakan kata “perikemanusiaan”. Apa yang dimaksud Soekarno dengan kata “perikemanusiaan”?

Soekarno sendiri yang menjelaskan:

“... prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvinisme*, sehingga berpaham “Indonesia *uber Alles*”. Inilah bahayanya. Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia! Ingatlah akan hal ini! Gandhi berkata: “Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan”, “*My nationalism is humanity...*” kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.... Inilah *filosofisch principe* yang nomor dua, yang saya usulkan kepada tuan-tuan, yang boleh saya namakan “internasionalisme”.
..Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme... Jadi, dua hal ini,... adalah bergandengan erat satu sama lain (Rahardjo, 2001:30-31).

Selanjutnya, Soekarno juga menegaskan bahwa:

“Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme*, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan “*Deutschlandüber Alles*” tidak ada setinggi Jermania yang katanya bangsanya *minulyo*, berambut jagung dan bermata biru...” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:76)

Pernyataan dari Soekarno itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa prinsip kebangsaan yang dianut Bangsa Indonesia (pada prinsip pertama) bukanlah berkiblat pada gagasan Hitler tentang superioritas bangsa Jerman. Memang bangsa Indonesia harus bangga berkebangsaan Indonesia, tetapi hal itu tidak lantas menjadikan manusia Indonesia merasa di atas bangsa yang lain. Berangkat dari simbol inilah Soekarno memperkenalkan prinsip yang kedua, yakni internasionalisme atau perikemanusiaan. Soekarno berpendapat bahwa rasa kebangsaan hanya dapat tumbuh jika ada dalam rasa persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain.

Kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan sifat hakiki manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*). Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut:

- a) Mengakui dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan agama dan kepercayaan, suku, ras, keturunan, adat, status

sosial, warna kulit, jenis kelamin, dan lain sebagainya.

- c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa (*tepo seliro*).
- d) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- e) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- g) Berani membela kebenaran dan keadilan dengan penuh kejujuran (Rahayu, 2019: 300).

Kesimpulannya, kemanusiaan atau “internasionalisme” yang

dimaksud oleh Soekarno adalah persatuan dunia, persaudaraan dunia, dan kekeluargaan bangsa-bangsa. Kesadaran itu menegaskan bahwa meski pun dibatasi oleh wilayah kenegaraan yang berbeda-beda, manusia tetap merupakan satu “keluarga”, dalam keluarga bangsa-bangsa. Selain itu, kemanusiaan menurut Soekarno mengetengahkan bahwa walau terpisah oleh wilayah kenegaraannya, manusia tetap bersaudara dan karenanya wajib untuk bersatu dalam persatuan global dan persatuan universal.

Lebih lanjut, Soekarno menjelaskan lebih panjang lebar mengenai “Sila Perikemanusiaan” dalam makalahnya untuk kursus

Pancasila tanggal 5 Juli 1958 di istana negara :

“... Perikemanusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa antara manusia dengan lain manusia adalah hubungannya, jiwa yang hendak mengangkat membedakan jiwa manusia itu lebih tinggi daripada jiwa binatang.... Jikalau kita berbuat sesuatu yang rendah yang membikin celaka kepadamanusia lain, kita berkata kita melanggar perikemanusiaan, kita melanggar hukum *menseljkheid*.

... Kita tidak menghendaki supaya nasionalisme kita menjadi nasionalisme yang *chauvinis*, tapi nasionalisme yang hidup di dalam suasana perikemanusiaan: nasionalisme yang mencari agar segala umat manusia ini akhirnya nanti hidup dalam satu keluarga besar yang sama bahagiannya”.

Kesimpulannya,

“kemanusiaan yang adil dan beradab” yang dimaksud oleh Soekarno adalah kesadaran bahwa manusia memiliki jiwa yang merasakan hubungan antara manusia yang satu dengan

manusia yang lain. Apabila seseorang mencelakakan manusia lain, maka dia sudah melanggar jiwa kemanusiaan tadi. Karena itu, kemanusiaan menjadikan seseorang selalu “beradab” sebagaimana disebutkan dalam KBBI beradab memiliki arti yaitu mempunyai adab; mempunyai budi bahasa yang baik; berlaku sopan, Kemanusiaan juga harus “adil” yaitu berarti sama berat, tidak berat sebelah, dalam artian, kemanusiaan menjadikan manusia Indonesia berupaya untuk hidup dalam satu “keluarga besar manusia” yang “sama bahagiannya”; “sama makmurnya”, “sama sejahteranya”; bukan “keluarga besar manusia” yang berbeda makmurnya, berbeda rejekinya,

tidak adil kesejahteraannya, tidak adil bahagiannya (Hidayat, 2018: 9).

Pancasila menunjukkan bentuk dari kemanusiaan dalam sila kedua yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama seperti dijelaskan dalam sila keadilan sosial dan sila persatuan Indonesia sehingga mampu mewujudkan keadilan dan kemanusiaan yang sempurna. Sedangkan upaya perwujudannya tertuang dalam sila kerakyatan sebagai mekanisme politik untuk mencapai tujuan dimaksud.

Yang dimaksud Soekarno dengan prinsip “Keadilan Sosial” adalah keadilan ekonomis atau kesejahteraan ekonomis atau

persamaan di dalam lapangan ekonomi yang hanya dapat dicapai lewat sistem sosialisme ala Indonesia yang disebutnya sebagai “Sosialisme Pancasila”. Pada saat sidang perumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengatakan:

“Prinsip nomor empat sekarang saya usulkan. Saya di dalam 3 hari ini belummendengarkan prinsip itu, yaitu “prinsip kesejahteraan”, “prinsip: tidak akan adakemiskinan di dalam Indonesia Merdeka”... Apakah kita mau Indonesia Merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semuaorang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?

Mana yang kita pilih, Saudara-saudara? Jangan Saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropa adalah Badan Perwakilan,

adalah *parlementaire democratie*. Tapi tidaklah di Eropa justru kaum kapitalis merajalela?...

Tak lain dan tak bukan sebabnya, ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyat yang diadakan di sana itu, sekadar menurut reseponya Fransche Revolutie. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan *democratie* di sana itu ialah *politieke democratie* saja; semata-mata tidak ada *socialrechtvaardigheid*, tak ada keadilan sosial, tidak ada *ekonomisch democratie* sama sekali...

Adakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik *economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini.

Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Ialah *social rechtvaardigheid*.

Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil.

Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *socialrechtvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politik, Saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya” (Alam, 2001: 25-27).

Demikianlah cita-cita Soekarno untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang berkeadilan tanpa membeda-bedakan suku, agama dan ras apapun di antara sesama anak bangsa..

2. Manusia yang Berkesejahteraan

Soekarno menggunakan simbolisme Ratu Adil dalam menjelaskan prinsip negara tentang kesejahteraan sosial.

Soekarno mengatakan:

“Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil ialah *socialerechtvaardigheid*, rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995:79).

Dalam alam pikiran masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, Ratu Adil adalah simbol tentang adanya kemakmuran yang dibawa oleh seorang terpilih. Ratu Adil seakan menjadi janji *mesianis* yang khas dimiliki oleh manusia

Indonesia. Di bawah kepemimpinan Sang Ratu Adil inilah akan datang kesejahteraan, kemakmuran, dan kelimpahan bersama di segala bidang. Kesejahteraan bersama inilah yang hendak digagas Soekarno dengan penggunaan simbolisme Ratu Adil. Prinsip kesejahteraan sosial yang diidamkan bersama haruslah diciptakan oleh prinsip demokrasi yang telah diutarakan sebelumnya. Dalam alam kemerdekaan dicita-citakan bersama inilah Ratu Adil akan datang (Dewantara, 2017:58).

Konsep kesejahteraan ini erat kaitannya dengan konsep “kerakyatan” yang ditawarkan oleh Soekarno. Dalam pidato saat merumuskan Pancasila di

sidang BPUPKI (tanggal 1 Juni 1945), Soekarno tidak menyebut sila ini dengan redaksi yang sekarang dikenal. Soekarno hanya menyebut sila ini dengan sebutan pendek, yaitu “dasar mufakat” atau “dasar demokrasi”. Soekarno mengatakan:

“... Apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satunegara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”... Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal..., yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan... Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-

pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan” (Rahardjo, 2001:31).

Selain itu, Soekarno juga mempertegas keterkaitan antara kesejahteraan dan kerakyatan yang merupakan perasan dari konsep *socio democratie* dalam pidato yang sama dengan mengatakan:

“Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-ecomische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial... Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *sociale rechtvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersamayang sebaik-baiknya” (Rahardjo, 2001:35).

Hal tersebut di atas dirumuskan Soekarno bukan

tanpa sebab. kesadaran bahwa kesenjangan kesejahteraan ekonomi masyarakat semakin terlihat dan menjadi fakta yang semakin tampak dan memenuhi kesadaran bersama. Karena itu, kesenjangan pemerataan keadilan dengan mendasarkan pada ide kesejahteraan sungguh merupakan problem yang harus segeradipecahkan bersama melalui konsep kerakyatan.

Prinsip	Filsafat
Pancasila,	silasila ketuhanan
menjadi pijakan	dan sila kemanusiaan
menjadi muara	tujuan. Sila keadilan sosial
ditempatkan	sebelum sila kemanusiaan,
karena sila	tersebut mempraksiskan
pemuliaan	terhadap manusia
dalam konteks	keadilan sosial.

Sebab, jika kemanusiaan adalah bentuk (*forma*), keadilan sosial adalah isi (*materia*). Sementara itu, sila kerakyatan ditempatkan sebelum sila keadilan sosial karena sila tersebut menjadi mekanisme politik bagi perwujudan keadilan sosial. Hasilnya, upaya pemanusiaan melalui keadilan sosial ini kemudian disempurnakan melalui pengadaban manusia dalam kerangka persatuan atas kemajemukan bangsa (sila ketiga) (Arif, 2016:26).

Pemahaman implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Implementasi

tersebut adalah (Srijanti, 2007: 67-68).

“Implementasi sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, menghendaki setiap warga negara untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan. Diharapkan setiap warga negara memiliki keyakinan kepada Tuhan yang menciptakan manusia dan dunia serta isinya yang diwujudkan dengan memeluk agama serta kepercayaan kepada Tuhan. Pedoman yang harus dilaksanakan setiap warga negara adalah bahwa setiap warga negara percaya dan takwa kepada Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghendaki sesama manusia tidak saling

melecehkan, sesama manusia punya rasa memiliki, setiap manusia menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, melakukan kegiatan kemanusiaan, donor darah, menyantuni anak yatim, kebenaran dan keadilan taat hukum dan tidak diskriminatif.

Implementasi sila ketiga, persatuan Indonesia, menghendaki kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, berkorban; bekerja keras dan membayar pajak, cinta tanah air, meningkatkan prestasi di segala bidang, bangga sebagai Bangsa Indonesia; berani dan percaya diri sebagai warga negara Indonesia.

Implementasi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menghendaki masyarakat harus mengawasi wakil rakyat, hasil musyawarah harus diterima dan dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menghendaki perbuatan luhur; saling membantu dan gotong royong, adil; tidak pilih kasih, menghormati orang lain; tidak menghalangi orang lain,

suka memberi pertolongan; tidak egois dan individual, bekerja keras, menghargai karya orang lain; tidak membajak”.

Implementasi tersebut berdasarkan runutan yang diuraikan secara tegas oleh Soekarno. Nasionalisme (kebangsaan) sebagai prinsip pertama diimbangi oleh prinsip yang kedua (kemanusiaan) agar Indonesia tidak terjerumus ke dalam chauvinisme sempit. Mufakat (prinsip yang ketiga) bukan demi kemenangan paham itu sendiri, melainkan demi mewujudkan keadilan sosial (prinsip yang keempat), dan terakhir ketuhanan dipakai sebagai prinsip yang terakhir sebagai pemersatu atas semua prinsip tersebut karena keseriusan dengan konsep tersebut.

Dalam alur pikir ini tidak mengherankan jika kemudian Soekarno memeras prinsip yang pertama dan kedua menjadi *socio-nationalisme*, prinsip ketiga dan keempat menjadi *socio-democratie*, dan Ketuhanan. Ini kemudian yang dinamakannya sebagai Tri-Sila. Tri Sila ini pun kemudian diperasnya ke dalam prinsip gotong-royong (Eka Sila). Mengapa? Karena, pertama: *socio-nationalisme* menampakkan dirinya dalam kebersamaan bangsa-bangsa tanpa menghilangkan identitas bangsa (ini adalah satu ciri dari semangat gotong-royong).

Kedua, *socio-democratie* menampakkan dirinya dalam mufakat bersama demi mencapai

kesejahteraan sosial bersama (ini juga ciri gotong-royong). Ketiga, Ketuhanan yang digagas Soekarno adalah ketuhanan yang berkebudayaan yang berarti ketuhanan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia dilandasi dengan semangat toleransi yang bisa menerima keberadaan para pemeluk agama lain. Budaya toleransi inilah ciri khas semangat gotong-royong dari Bangsa Indonesia sejak dulu kala (Dewantara, 2017: 78)

3. Manusia yang Berketuhanan

Sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung dua pengertian pokok, yaitu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa (pengertian lainnya tentang apa?). Ketuhanan berasal dari

kata Tuhan, yaitu zat Yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta. Oleh sebab itu, tidak satu pun yang dapat menyamai-Nya.

Secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah:

- a. Adanya sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antarpemeluk beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak asasi yang paling hakiki.
- f. Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- g. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain.
- h. Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing (Notonagoro, 1974: 57).

Sebagai dasar filsafat negara Indonesia nilai-nilai Pancasila telah ada pada Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang nilai-nilainya telah hidup pada Bangsa Indonesia merupakan kausa materialis (sebab material, seperti yang dijelaskan filsuf Aristoteles). Kausa materialis merupakan produk warisan leluhur yang digali dari nilai budaya bangsa Indonesia. Isi dari warisan leluhur tersebut berupa nilai-

nilai askiologis Pancasila yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku sehari-hari, baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat (2020: 25).

Hal ini mengandung makna bahwa negara dengan Tuhan adalah hubungan sebab-akibat yang tidak langsung melalui manusia sebagai pendukung pokok negara. Maka sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila pertama bahwa adanya Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia telah menjadi suatu keyakinan, sehingga adanya Tuhan bukanlah persoalan melainkan sudah menjadi suatu kenyataan secara objektif (Notonagoro, 1974: 67).

Prinsip ketuhanan Yang Maha Esa harus dimasukkan ke dalam Pancasila, karena menurut Soekarno, Bangsa Indonesia pada umumnya adalah bangsa yang ber-Tuhan (Rahardjo, 2001: 35). Sudah dari zaman nenek moyang, manusia-manusia yang mendiami tanah Indonesia adalah pada umumnya manusia-manusia yang ber-Tuhan. Dengan kata lain, manusia Indonesia, menurut Soekarno, memiliki jiwa, corak karakter, watak, pembawaan, dan kepribadian umum, yakni manusia religius (Aning, 2016: 58).

SIMPULAN

Pancasila menunjukkan bentuk dari kemanusiaan dalam sila kedua yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan seperti dijelaskan dalam sila

keadilan sosial dan sila persatuan Indonesia, sehingga mampu mewujudkan keadilan dan kemanusiaan yang sempurna. Sedangkan upaya perwujudannya tertuang dalam sila kerakyatan sebagai mekanisme politik untuk mencapai tujuan dimaksud.

Pembangunan manusia Indonesia dalam mengimplementasikannya harus dengan langkah konkret yang memiliki kesesuaian dengan falsafah negara, yaitu Pancasila. Hal ini karena pembangunan manusia Indonesia dalam perspektif filsafat Pancasila Soekarno diartikan sebagai pembangunan yang tidak sekedar menekankan pada aspek kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, melainkan juga pada

aspek religiusitas atau aspek ketuhanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aning, Floriberta (ed). (2016). *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Yogyakarta: Media Presindo.
- Arif, Syaiful. (2016). *Falsafah Kebudayaan Pancasila; Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewantara, W Agustinus. (2017). *Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam Kacamata Soekarno)*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Notonagoro.(1974). *Pancasila Dasar Filsafah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Poespowardojo, S dan Hardjatno, N. J. M. T. (2010). *Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Pokja Ideologi*. Jakarta: Lemhannas.
- Rahardjo, Iman Toto K. dan W. K, Herdianto (ed). (2001). *Bung Karno, Wacana Konstitusi dan Demokrasi: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, Jakarta: Grasindo.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia.(1995)..*Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*. Jakarta: Kementerian Setneg.
- Srijanti, A. Rahman, H.I. Purwanto S. K. (2007). *Etika Berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: SalembaEmpat.
- UNDP. (2009). *Human Development Report 2009*.
- Hidayat, Ferry. (2018). *Pancasila: Perspektif Pendiri RI dan Problematikanya*”. Koleksi Digital IAIN Palangka Raya.
- Mahendra, Putu Ronny Angga dan I Made Kartika . (2020). *Memperkuat Kesadaran Bela Negara Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Kekinian*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (September, 2020). P-ISSN : 2599-2694, E-ISSN : 2599-2686 22.
- Rahayu, MH. Sri. (2019). *Strategi Membangun Karakter Generasi Muda yang Beretika Pancasila dalam Kebhinekaan dalam Perspektif Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Pendidikan, Volume 28, Nomor 3, Nopember 2019.
- Rorong, Michael Jibrael. (2020). *Fenomenologi*. Yogyakarta : Deepublish Publisher